SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Penerapan Audit Internal pada Organisasi Perangkat Daerah

Adinda Sinlaeloe[1], Frescilia Polin[2], Sonya Laho'an[3], Agnes Tukan[4], Olivia De Jesus[5], Susana Purnamasari Baso[6]
Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia
Email Korespondensi: adindasinlaeloe29@gmail.com

Submitted: 03rd Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Sinlaeloe, A., Polin, F., Laho'an, S., Tukan, A., Jesus, O. D., & Baso, S. P. (2026). Penerapan Audit Internal pada Organisasi Perangkat Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(1), 184-191.

ABSTRACT

The effectiveness of internal audit remains a critical issue in Regional Government Organizations (OPD), particularly in ensuring accountable and transparent financial management. In practice, internal audit functions often face limitations related to auditor competence, institutional support, and follow-up of audit recommendations. This study aims to examine the implementation of internal audit in OPD, analyze audit procedures conducted by Regional Inspectorates, and identify key factors influencing audit effectiveness. The research employs a qualitative descriptive approach through a structured literature review. Data were collected from scientific journals, government regulations, books, and prior empirical studies, and analyzed using content analysis to identify recurring themes and patterns. The results indicate that internal audit plays a significant role in strengthening internal control systems, improving regulatory compliance, and enhancing the reliability of financial reporting in local governments. The Regional Inspectorate conducts various audit activities, including financial audits, performance audits, specific-purpose audits, evaluations, reviews, and monitoring. However, audit effectiveness is constrained by limited budgets, uneven auditor competencies, weak information system integration, and administrative challenges. Strengthening auditor capacity, improving institutional support, and ensuring leadership commitment to audit follow-up are essential to enhance the role of internal audit in regional governance.

Keywords : Internal Audit, OPD, Regional Inspectorate, Internal Control, Local Government

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana utama urusan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik. Kompleksitas tugas OPD, ditambah dengan keterbatasan sumber daya dan tingginya tuntutan publik, menjadikan pengawasan internal sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Kerangka kelembagaan OPD di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Regulasi ini memberikan pedoman bagi pemerintah

daerah dalam membentuk struktur organisasi yang efisien, tepat fungsi, dan sesuai dengan karakteristik daerah. Penataan OPD yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, penguatan struktur organisasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh sistem pengawasan internal yang berjalan secara efektif.

Audit internal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Melalui audit internal, pemerintah daerah dapat menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Peran tersebut dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, yang bertugas memberikan jaminan dan konsultasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Keberadaan audit internal diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi kesalahan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan.

Meskipun peran audit internal telah diatur secara normatif, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaannya di lingkungan OPD belum sepenuhnya optimal. Sejumlah penelitian mengungkapkan adanya kendala berupa keterbatasan kompetensi auditor, kurangnya independensi, minimnya dukungan anggaran, serta lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi audit internal dalam mendorong akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD. Di sisi lain, masih terdapat kecenderungan bahwa audit internal dipandang sebagai kegiatan administratif semata, bukan sebagai mitra strategis manajemen daerah.

Penelitian terdahulu umumnya menelaah audit internal dari sudut pandang empiris pada daerah atau instansi tertentu. Namun, penelitian yang merangkum konsep, regulasi, praktik audit internal, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya pada OPD melalui pendekatan kajian literatur masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman menyeluruh berbasis literatur penting untuk memberikan gambaran konseptual yang utuh dan menjadi rujukan bagi penguatan fungsi Inspektorat Daerah di berbagai wilayah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan audit internal pada Organisasi Perangkat Daerah, menelaah prosedur audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian audit internal sektor publik, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LANDASAN TEORI

Audit Internal

Audit internal dalam sektor publik merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan audit eksternal yang berorientasi pada pemberian opini atas laporan keuangan, audit internal memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal. Dalam konteks pemerintahan daerah, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga

sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyimpangan serta sarana peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Pendekatan audit internal modern menempatkan auditor internal sebagai mitra strategis manajemen. Auditor tidak lagi semata-mata berperan menemukan kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi organisasi. Dengan demikian, audit internal berkontribusi langsung terhadap perbaikan berkelanjutan melalui identifikasi risiko, penguatan sistem pengendalian, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan audit, kecukupan bukti, serta kemampuan auditor dalam menyampaikan rekomendasi yang realistis dan aplikatif.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Daerah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari APIP memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan atas seluruh aktivitas OPD melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Peran ini menempatkan Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam praktiknya, efektivitas Inspektorat Daerah sangat bergantung pada kedudukan kelembagaan, independensi fungsional, serta dukungan sumber daya yang memadai. Inspektorat yang memiliki posisi strategis dan memperoleh dukungan pimpinan daerah cenderung lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Sebaliknya, keterbatasan kewenangan, anggaran, dan kompetensi auditor sering kali menghambat peran APIP dalam memberikan jaminan yang memadai atas tata kelola pemerintahan daerah.

Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Audit internal memiliki hubungan yang erat dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengendalian yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme evaluasi atas efektivitas penerapan unsur-unsur SPIP tersebut.

Melalui audit internal, kelemahan dalam sistem pengendalian dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Dengan kata lain, audit internal berperan sebagai alat penilaian independen yang membantu manajemen memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana dirancang dan mampu merespons dinamika risiko yang terus berkembang.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal

Efektivitas audit internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur dan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung. Kompetensi auditor menjadi faktor utama, mencakup pengetahuan teknis, pengalaman, serta kemampuan analitis dan komunikasi. Auditor yang kompeten mampu memahami kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dan menyusun rekomendasi yang relevan dengan kondisi OPD.

Selain kompetensi, independensi dan objektivitas auditor juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor internal harus mampu menjaga sikap profesional dan bebas dari tekanan pihak yang diaudit. Dukungan manajemen, khususnya komitmen pimpinan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, turut

menentukan sejauh mana hasil audit memberikan dampak nyata. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem pengawasan, yang dapat meningkatkan efisiensi serta ketepatan proses audit.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, audit internal pada OPD dipahami sebagai proses pengawasan yang dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi auditor, dukungan kelembagaan Inspektorat Daerah, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan kemampuan audit internal dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kinerja OPD. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk memahami bagaimana audit internal diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di lingkungan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan audit internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena audit internal secara mendalam melalui interpretasi terhadap konsep, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu. Fokus penelitian diarahkan pada peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mekanisme audit internal yang diterapkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka yang bersifat sistematis. Literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks audit sektor publik, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik audit internal dan OPD. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit atau jurnal, serta tahun publikasi yang relatif mutakhir. Literatur yang dipilih pada umumnya diterbitkan setelah tahun 2019 untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan terbaru dalam praktik audit internal sektor publik.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Setiap sumber dibaca secara cermat untuk mengekstraksi informasi penting yang berkaitan dengan konsep audit internal, peran Inspektorat Daerah, jenis dan prosedur audit, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data yang telah terkumpul kemudian dicatat secara sistematis menggunakan lembar pencatatan data guna memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis. Tahapan analisis dimulai dengan pengkodean data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti mekanisme audit internal, efektivitas pengawasan, dan faktor pendukung maupun penghambat audit. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap isi literatur dengan membandingkan temuan antar sumber untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan pandangan. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yang menggambarkan bagaimana audit internal diterapkan pada OPD serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal dan referensi yang berbeda. Selain itu, peneliti mengutamakan penggunaan sumber yang telah melalui proses peer-review dan regulasi resmi pemerintah sebagai dasar analisis. Dengan

demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan yang memadai dan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan audit internal di lingkungan pemerintahan daerah.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Audit Internal pada OPD

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dianalisis, audit internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tujuan utama memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit internal menjadi instrumen pengawasan yang berfungsi menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta keandalan sistem pengendalian internal di lingkungan OPD.

Pelaksanaan audit internal dilakukan secara periodik dan berbasis risiko, dengan memperhatikan karakteristik serta tingkat kompleksitas masing-masing OPD. Auditor internal melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan, guna memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan audit internal memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan kesadaran OPD terhadap pentingnya kepatuhan regulasi.

Jenis dan Proses Audit Internal oleh Inspektorat Daerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan internal yang mencakup audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Audit keuangan difokuskan pada penilaian kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Audit kinerja diarahkan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD, sedangkan audit dengan tujuan tertentu dilakukan untuk merespons isu spesifik, permintaan pimpinan daerah, atau risiko tertentu.

Selain audit, Inspektorat Daerah juga melaksanakan kegiatan evaluasi, reviu, dan pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kebijakan dan program secara menyeluruh, sementara reviu berfungsi memberikan keyakinan terbatas atas keandalan dokumen atau laporan tertentu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti oleh OPD. Temuan literatur menunjukkan bahwa proses pemantauan menjadi aspek penting dalam memastikan hasil audit tidak berhenti pada laporan, tetapi berkontribusi pada perbaikan nyata.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit internal pada OPD dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Kompetensi auditor menjadi faktor dominan, mencakup pengetahuan teknis, pengalaman, serta kemampuan analitis dan komunikasi. Auditor dengan kompetensi yang memadai cenderung menghasilkan temuan dan rekomendasi yang lebih berkualitas dan mudah ditindaklanjuti.

Faktor lain yang berpengaruh adalah independensi dan objektivitas auditor, dukungan manajemen, serta kejelasan lingkup audit. Dukungan pimpinan daerah dan kepala OPD sangat menentukan efektivitas audit, khususnya dalam hal keterbukaan informasi dan tindak lanjut rekomendasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem pengawasan juga memengaruhi kelancaran proses audit dan ketepatan hasil pemeriksaan.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Audit Internal di OPD

Meskipun audit internal telah dijalankan secara struktural, hasil kajian mengungkapkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran operasional menjadi hambatan utama yang membatasi ruang lingkup dan kedalaman audit. Selain itu, jumlah auditor yang tidak sebanding dengan luasnya objek pengawasan serta kompetensi auditor yang belum merata turut memengaruhi kualitas audit internal.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum optimalnya integrasi sistem informasi pengawasan serta kendala administratif, seperti perbedaan format dokumen, kehilangan arsip, dan rotasi pegawai. Kondisi tersebut sering kali menyulitkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang memadai dan memperlambat proses tindak lanjut temuan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alzeban (2020) dan Badara dan Saidin (2019) yang menyatakan bahwa audit internal sektor publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola organisasi pemerintah. Audit internal yang dilaksanakan secara sistematis mampu membantu OPD mengidentifikasi kelemahan pengendalian serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Pelaksanaan berbagai jenis audit oleh Inspektorat Daerah mencerminkan pendekatan pengawasan yang komprehensif. Audit keuangan, audit kinerja, serta audit dengan tujuan tertentu memungkinkan pengawasan dilakukan tidak hanya pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada pencapaian kinerja dan efektivitas program. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Romarito (2020) yang menegaskan bahwa keberagaman bentuk pengawasan internal meningkatkan nilai tambah audit bagi organisasi pemerintah daerah.

Namun demikian, efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Keterbatasan kompetensi auditor dan kurangnya independensi fungsional sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini juga dilaporkan oleh Saputra dan Umanto (2024), yang menyatakan bahwa kualitas audit internal sangat bergantung pada kapasitas auditor dan komitmen pimpinan instansi. Tanpa dukungan manajemen yang kuat, rekomendasi audit cenderung tidak ditindaklanjuti secara optimal.

Permasalahan keterbatasan anggaran dan lemahnya pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa audit internal masih menghadapi tantangan struktural. Hal ini sejalan dengan temuan Djasuli dan Rizqillah (2025) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang belum terintegrasi menghambat efektivitas fungsi Inspektorat Daerah. Oleh karena itu, penguatan audit internal tidak hanya memerlukan peningkatan kompetensi auditor, tetapi juga perbaikan sistem dan kebijakan pendukung.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa audit internal pada OPD telah berjalan sesuai kerangka regulasi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas, dukungan kelembagaan, dan tindak lanjut rekomendasi. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, audit internal berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya good governance di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Melalui kajian literatur yang telah ditelaah, terlihat jelas bahwa audit internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan hanya dijalankan sebagai proses pemeriksaan biasa, tetapi menjadi alat penting yang mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Argumentasinya bertumpu pada temuan bahwa audit internal mampu memberikan keyakinan atas kepatuhan OPD terhadap regulasi, serta membantu menemukan titik-titik lemah dalam sistem pengendalian internal yang berpotensi menimbulkan inefisiensi maupun penyimpangan anggaran. Melalui peran Inspektorat Daerah sebagai APIP, audit internal menjadi alat kontrol yang mendorong OPD untuk bekerja lebih tertib, terarah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Namun, efektivitas audit internal tidak muncul secara otomatis. Kajian ini menunjukkan bahwa berbagai faktor penghambat seperti keterbatasan kompetensi auditor, kurangnya independensi, minimnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala nyata. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan audit internal sangat bergantung pada kemampuan dan kualitas para auditor yang melaksanakannya, komitmen pimpinan OPD, serta kemampuan Inspektorat dalam membangun sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan kata lain, audit internal hanya akan bermakna apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat dan tindak lanjut rekomendasi yang konsisten.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit internal memegang posisi sentral dalam mendorong terwujudnya good governance di daerah. Akan tetapi, untuk memastikan audit internal memberikan dampak yang signifikan, diperlukan penguatan fungsi Inspektorat Daerah, peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan, serta komitmen serius dari seluruh OPD untuk menindaklanjuti temuan audit. Tanpa sinergi antara unsur-unsur tersebut, audit internal hanya akan menjadi aktivitas administratif semata, bukan alat perbaikan yang mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Alzeban, A. (2020). Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of public sector organizations. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(2), 317-334.

Andini Anjali, & Morasa, J. (2021). Peran auditor internal dalam mewujudkan kepatuhan organisasi perangkat daerah di bidang penatausahaan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 12(2), 145-158.

Badara, M. S., & Saidin, S. Z. (2019). The relationship between internal audit effectiveness and public sector performance. *International Journal of Public Sector Management*, 32(3), 224-243.

Bowen, G. A. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 20(2), 123-136.

Christopher, J., Sarens, G., & Leung, P. (2019). A critical analysis of the independence of the internal audit function. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(1), 1-28.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.

Djasuli, M., & Rizqillah, M. W. (2025). Auditor sebagai aktor kunci dalam penguatan fungsi pengawasan di inspektorat daerah. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 6(1), 174-186.

Ferreira, A., & Morais, A. I. (2020). The role of internal audit in public governance. *Financial Accountability & Management*, 36(2), 117-135.

Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.

Gobay, R., & Pasae, Y. (2025). Evaluasi kinerja aparat pengawasan internal pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 10-19.

Hamidah, H., Adawiyah, D., & Silvera, D. L. (2024). Pengaruh audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(4), 338-347.

Hazaea, S. A., Tabash, M. I., & Khatib, S. F. A. (2020). Internal audit quality and its impact on public sector accountability. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 36-43.

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.

Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah. *Jurnal Economia*, 15(2), 171-190.

Mihret, D. G., & Grant, B. (2019). The role of internal auditing in corporate governance: A synthesis of the literature. *Managerial Auditing Journal*, 34(5), 545-569.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13.

Romarito, C. S. (2020). Evaluasi pelaksanaan audit internal pada inspektorat daerah. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(3), 1-15.

Roussy, M., & Brivot, M. (2020). Internal audit quality: A polysemous notion? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(3), 597-622.

Saputra, R. E., & Umanto, U. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal pada instansi pemerintah. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 10205-10213.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson Education.

Turetken, O., Jethefer, S., & Ozkan, B. (2021). Information systems and internal audit effectiveness in the public sector. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101-118.

Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Yolivia Nurfadillah, Mustika, R., & Yentifa, A. (2022). Peran audit internal dalam pencegahan fraud pada sektor pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 1(2), 18-22.